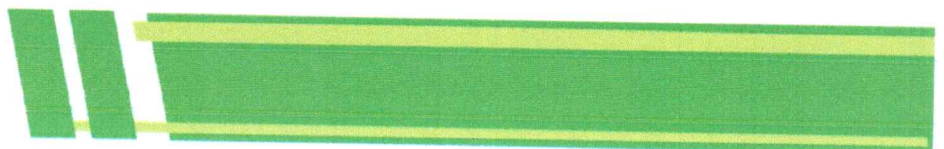




**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKjIP)
TAHUN 2025**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2026**





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang Panjang, 25 Maret 2026

Inspektur,

Ferino Romko, S.STP.,M.Si.

Pembina IV.a/ Nip.198602102006021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang tahun 2025 selesai disusun. LKjIP merupakan wujud implementasi akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Kota Padang Panjang kepada pemerintah tingkat atas sebagai konsekuensi penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan laporan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan kinerja kepada Wali Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan ini menyajikan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Informasi yang dimuat dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang dimasa yang akan datang.

Padang Panjang, 20 Februari 2026

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG**


JANUARDI, SS. M. Si
NIP. 19750122 200212 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024–2026 serta Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025–2029 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan dokumen tersebut, disusun Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang ingin dicapai. Penetapan kinerja tersebut menjadi dasar dalam penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025

Ringkasan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dihasilkan di tahun 2025 sebagai berikut :

Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

➤ Tujuan

1. “Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat” dengan Indikator Tujuannya adalah “Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat” dengan target tahun 2025 sebesar 60 dengan realisasi 70,99 berdasarkan Surat dari Perpustakaan RI Nomor B.844/4/APB.00.02/II.2026 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025 dan persentase capaian 118,32%.
2. “Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku” dengan indikator tujuan adalah “Nilai LAKE” dengan target tahun 2025 sebesar 87,5 dan realisasi 80,53 serta persentase capaian sebesar 92,03%.

➤ Sasaran

1. “Meningkatnya Minat Baca Masyarakat” dengan indikator sasaran “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat” dengan target 2025 sebesar 96,80 dan realisasi tahun 2025 sebesar 30,74 dengan persentase capaian sebesar 31,76%.

2. “Meningkatnya Penyelamatan, Pembinaan dan Penataan Arsip Secara Baku di OPD” dengan indikator sasaran “Rata-rata Nilai LAKI OPD” dengan target tahun 2025 sebesar 83,08 dengan realisasi 84,55 dan persentase capaian 101,77%.

Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

➤ Tujuan

Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu:

“Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat” dengan Indikator Tujuannya adalah “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat” dengan target tahun 2025 sebesar 97,88 dengan realisasi 30,74 berdasarkan Surat dari Perpusna Nomor B.844/4/APB.00.02/II.2026 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025.

➤ Sasaran

Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator sasaran “Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan” dengan target 2025 sebesar 68,5 sedangkan realisasinya belum keluar karena saat ini masih berlangsung penilaian AKIP oleh Inspektorat.
2. “Meningkatnya Minat Baca Masyarakat” dengan indikator sasaran “Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat” dengan target tahun 2025 sebesar 74 dengan realisasi 70,99.
3. “Meningkatnya konservasi, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD” dengan Indikator Sasaran “Rata-rata Nilai LAKI OPD” dengan target 83,08 dan realisasi 84,55.

Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

Indikator Kinerja Utama

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
• Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	74	70,99	95,93%
• Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68,5	Hasil belum keluar	n/a
• Rata-Rata Nilai LAKI OPD	83,08	84,55	101,77%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Indikator Kinerja Kunci

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
• Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	74	70,99	95,93%
• Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	97,88	30,74	31,41%
• Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)	61,85	87,93	142,17%
• Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	70,33	83,33	118,48%
• Nilai LAKE	91,7	80,53	87,82%
• Rata-rata Nilai LAKI OPD	83,08	84,55	101,77%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Faktor Pendorong Keberhasilan

Faktor Pendorong keberhasilan di bidang Kearsipan tercapainya Kinerja tahun 2025 ini disebabkan :

- a. Adanya peningkatan nilai LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal) di Lingkungan Kota Padang Panjang karena telah meningkatnya kesadaran OPD dalam pengelolaan arsip yang benar.
- b. Terlaksananya fungsi Lembaga Kearsipan Daerah Kota Padang Panjang baik dari segi pengelolaan kearsipan maupun dari segi layanan kearsipannya.

Faktor Penghambat Keberhasilan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

➤ Bidang Perpustakaan

1. Maraknya penggunaan teknologi dalam masyarakat seperti penggunaan gawai dan internet sehingga menghambat minat baca masyarakat.
2. Rendahnya kemampuan intelegensi masyarakat sehingga penyerapan literasi tergolong lemah.
3. Rendahnya tingkat akreditasi perpustakaan sekolah karena faktor kurangnya sarana prasarana pada perpustakaan sekolah.
4. Terjadi perubahan nilai IPLM yang sangat signifikan karena Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah melakukan analisis dan melakukan perubahan rumus dan instrumen pengukuran IPLM dan TKM yang disesuaikan dengan kewenangan pada Pemerintah Daerah. Adapun pokok perubahan dimaksud meliputi:
 - Penyesuaian metodologi pengukuran IPLM dan TKM yang disesuaikan berdasarkan kewenangan daerah.
 - Integrasi indikator baru yang merefleksikan perkembangan ketersediaan anggaran, kolaborasi/kerjasama dengan mitra, dokumen kebijakan, dan perilaku literasi masyarakat;
 - Penyesuaian dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan dalam penghitungan IPLM dan TKM.

- Penyelarasan bobot dimensi dalam penghitungan IPLM antara kepatuhan dan kinerja guna memastikan akurasi, reliabilitas, serta kesesuaian dengan arah pembangunan nasional.
- Penyelarasan bobot dimensi dalam penghitungan TKM antara pra membaca, saat membaca, dan pasca membaca guna memastikan akurasi, reliabilitas, serta kesesuaian dengan arah pembangunan nasional.
- Seiring dengan penyesuaian metodologi, dimensi, indikator, serta bobot penghitungan IPLM dan TKM tersebut, target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah pada urusan perpustakaan perlu dilakukan penyesuaian agar tetap relevan, terukur, dan selaras dengan kewenangan daerah serta kebijakan pembangunan nasional. Penyesuaian target IKK ini dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan antara instrumen pengukuran, capaian kinerja daerah, dan evaluasi pembangunan literasi masyarakat, sehingga hasil penilaian dapat digunakan secara optimal sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah.

➤ **Bidang Kearsipan**

1. Keterbatasan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan kearsipan
2. Masih kurangnya peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan kearsipan.
3. Aspek penilaian berbeda dari tahun sebelumnya.
4. Pengelolaan kearsipan masih menggunakan kebijakan lama sedangkan dalam waktu berjalan keluar kebijakan baru yang dijadikan pedoman dalam penilaian kearsipan.

Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk mengatasi kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

➤ **Bidang Perpustakaan**

- Menciptaan inovasi yang menarik bagi masyarakat sebagai usaha menarik minat baca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan, Seperti : Mengadakan kelas kreatif, program Read A Loud, berbagai lomba serta reward kepada pemustaka terbaik.
- Sosialisasi pada masyarakat melalui media sosial atau kunjungan langsung tentang pentingnya membaca serta manfaat yang diperoleh dari bacaan tersebut.

- Konsolidasi dengan Dinas Pendidikan tentang perpustakaan sekolah khususnya pengadaan sarana prasarana perpustakaan serta pengusulan pustakawan khusus perpustakaan sekolah.
- Menyesuaikan analisis dan menyesuaikan rumus dan instrumen pengukuran IPLM dan TKM yang disesuaikan dengan kewenangan pada Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam penilaian oleh Perpustnas.

➤ Bidang Kearsipan

1. Mengupayakan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan kearsipan
2. Melaksanakan Pelatihan atau Bimbingan Teknis Kearsipan bagi pengelola arsip/ arsiparis
3. Pengelolaan kearsipan untuk tahun berikutnya akan menyesuaikan dengan kebijakan yang terbaru.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja	1
	1.3 Susunan Organisasi	6
	1.4 Sumber Daya Manusia	8
	1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis	8
BAB II	Perencanaan Kinerja	9
	2.1 Rencana Strategis	9
	2.2 Perjanjian Kinerja	15
BAB III	Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	17
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
	3.2 Realisasi Anggaran	19
BAB IV	PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025, diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Mendorong Dinas perpustakaan dan Kearsipan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja

1. Dasar pembentukan organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Panjang menyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- e. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas berdasarkan rencana strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- g. Mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai dengan rencana.

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- 1. Sekretariat
- 2. Bidang Perpustakaan
- 3. Bidang Kearsipan
- 4. UPTD

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai pasal 4 mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi pelaksana teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat pasal 4 sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahandi bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- e. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas berdasarkan rencana strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- g. Mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai dengan rencana.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian program kegiatan bidang
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Dinas
- c. Pengoordinasian penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset Dinas
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas
- f. Pengoordinasian fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data informasi Dinas
- g. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
- h. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas
- i. Pengoordinasian fasilitas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
- j. Pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan Dinas
- k. Penatausahaan keuangan Dinas
- l. Pengelolaan perbendaharaan Dinas
- m. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas
- n. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas
- o. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perpustakaan.

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2024 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan perpustakaan.
- d. Merencanakan operasional di Bidang Perpustakaan berdasarkan program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Kerja Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- f. Perencanaan teknis pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- g. Pelaksanaan teknis pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- h. Pembuatan laporan dan evaluasi teknis pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan
- i. Perencanaan teknis pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.
- j. Pelaksanaan teknis pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.
- k. Pembuatan laporan dan evaluasi teknis pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.
- l. Perencanaan teknis pembinaan perpustakaan.
- m. Pelaksanaan teknis pembinaan perpustakaan.
- n. Pembuatan laporan dan evaluasi teknis pembinaan perpustakaan.
- o. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pengolahan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- p. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target yang diharapkan.
- q. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target yang diharapkan.
- r. Merancang system pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan public sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan tugas.

- s. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Perpustakaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kearsipan

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

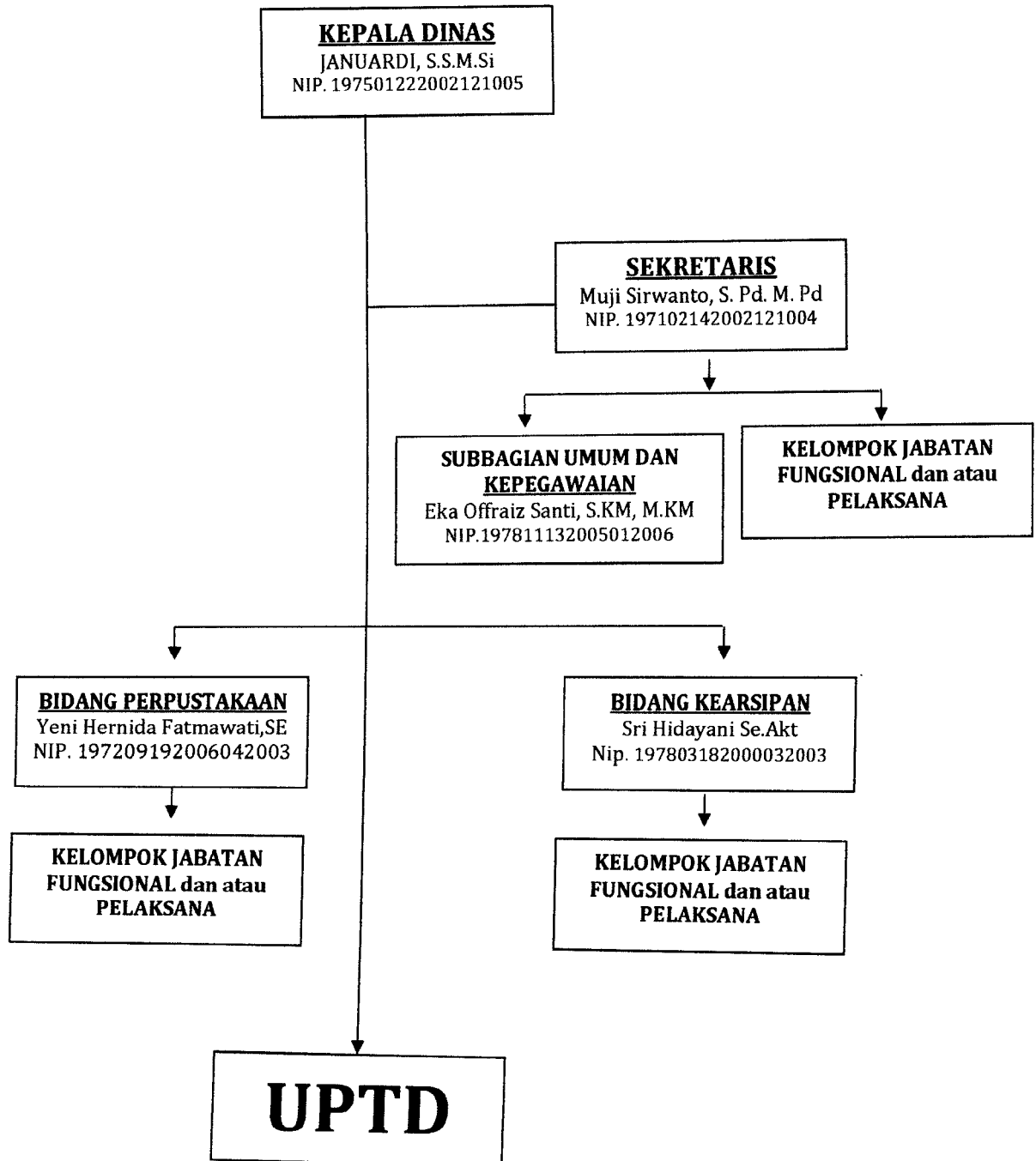
- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan penataan dan pelestarian arsip.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengolahan dan layanan kearsipan.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kearsipan.
- d. Merencanakan operasional di lingkup Bidang Kearsipan berdasarkan program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional, Penataan dan Pelestarian Arsip sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- f. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pengolahan dan layanan kearsipan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- g. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan kearsipan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan.
- h. Merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan public sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang Kearsipan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- k. Perencanaan teknis penataan dan pelestarian arsip.
- l. Pelaksanaan teknis penataan dan pelestarian arsip.

- m. Pembuatan laporan dan evaluasi teknis penataan dan pelstarian arsip.
- n. Perencanaan teknis pengolahan dan layanan kearsipan.
- o. Pelaksanaan teknis teknis pengolahan dan layanan kearsipan.
- p. Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pengolahan dan layanan kearsipan.
- q. Perencanaan teknis pembinaan dan pengawasan kearsipan.
- r. Pelaksanaan teknis pembinaan dan pengawasan kearsipan.
- s. Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan kearsipan.
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

1.3 Susunan Organisasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1.4 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai struktur organisasi terdiri dari 4. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang sebanyak 35 Orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Keadaan Sumber Daya Manusia berdasarkan kualifikasi pendidikan

**Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Sarjana - S2	4	
2	Sarjana - S1	13	
3	Diploma 3	6	
4	SMA	12	
5	SMP	-	
6	SD	-	
	Jumlah	35	

Sumber data : Bezzetting Dinas Perpustakaan dan Kearsipan keadaan 25 Desember 2025

- Keadaan Sumber Daya Manusia berdasarkan golongan kepangkatan

**Komposisi SDM berdasarkan Jabatan
Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eslon II	1	
2	Eslon III	3	
3	Eslon IV	1	
4	Pejabat fungsional	8	
5	Staf/Non Eslon	12	
6	PPPK	10	
	Jumlah	35	

Sumber data : Bezzetting Dinas Perpustakaan dan Kearsipan keadaan 25 Desember 2025

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Aspek Strategis

Aspek strategis Dinas Perpustakaan dan Kaarsipan Kota Padang Panjang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strengths)

- Sumber daya manusia yang berkompeten.
- Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
- Koleksi yang memadai secara jumlah dan kualitas.
- Pembaruan koleksi yang cukup baik dan variatif.
- Gedung perpustakaan dan kearsipan yang memadai.
- Layanan terbuka (akses terbuka).
- Layanan pemustaka yang variasi dan terotomasi.
- Koleksi digital yang tersedia.
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip.

2. Kelemahan (Weakness)

- Perawatan koleksi yang belum maksimal.
- Sarana dan prasarana yang belum maksimal.
- Masih kurangnya sumber daya dalam penunjang pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
- Dana yang terbatas

3. Peluang (Opportunities)

- Adanya peningkatan jumlah pemustaka dan pengunjung galeri arsip.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan dan layanan pemustaka.

4. Ancaman (Threats)

- Beralihnya kebutuhan pemustaka ke koleksi digital.
- Peningkatan jumlah pemustaka yang tidak diiringi dengan prasarana yang lengkap

Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tersedianya fasilitas perpustakaan daerah yang memadai ditandai dengan telah terakreditasi A	Rendahnya minat baca masyarakat	Akses informasi dan pendidikan berkelanjutan dan Pendidikan Berkualitas)	Perkembangan teknologi digital (AI, IoT, e-library)	Implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS)	Penguatan peran perpustakaan sebagai mitra pembangunan daerah	Meningkatkan akses dan kualitas layanan perpustakaan inklusif
2. Ketersediaan SDM pustakawan bersertifikat	Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan binaan	Pemerataan layanan publik berbasis literasi	Transformasi perpustakaan menjadi pusat komunitas belajar	Penekanan literasi sebagai prioritas pembangunan SDM	Kebutuhan integrasi program literasi dengan sekolah/madrasah lokal	Optimalisasi peran perpustakaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pendidikan sepanjang hayat
Padang Panjang meraih peringkat I Pengawasan Kearsipan Eksternal 2023	Belum terpenuhinya nilai pada instrument penilaian LAKE	Keterbatasan daya dukung SDM dan sarana prasarana	a) Digitalisasi dan preservasi arsip digital b) Keamanan dan Privasi data c) Aksesibilitas arsip d) Authenticity & Trustworthiness e) Bencana dan Resiliensi Arsip f) AI dan Otomatisasi Kearsipan	Implementasi Program prioritas Nasional: a) Transformasi ke Sistem Digital b) Big Data Kearsipan/ Big Archives sebagai Pusat Khazanah	Keterlibatan OPD dalam penilaian Kearsipan berpontensi mendukung hasil pengawasan yang lebih baik	Peningkatan Pemenuhan instrument kearsipan

Sumber Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1.6 Tindak lanjut atau laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Hasil evaluasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2024 memperoleh nilai 66,75 predikat B. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Hasil Evaluasi AKIP
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang
Tahun 2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	20,40
2	Pengukuran Kinerja	30	16,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,60
4	Evaluasi Internal	25	17,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,75
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber data : LHE Instektoral Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024

Hasil evaluasi SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang tahun 2025 senilai 66,75 jika dibandingkan dengan nilai evaluasi tahun 2023 senilai 71,15 mengalami penurunan sebesar 4,40%. Adapun tindak lanjut atas capaian kinerja yang belum optimal pada tahun 2024 dilaksanakan pada tahun 2025 melalui:

1. Penyusunan Penjenjangan Kinerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan logical Framework dan mengidentifikasi seluruh critical succses faktor dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja organisasi;
2. Pemantauan capaian rencana aksi secara berkala melalui penyusunan laporan pengukuran kinerja dan laporan realisasi rencana aksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang yang disusun setiap triwulan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan pertimbangan potensi yang dimiliki organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025-2029 merupakan perubahan dari Renstra 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang dan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam melakukan perubahan sistem untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kota Padang Panjang.

2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan ditetapkan dengan berpedoman kepada pencapaian kinerja 5 tahun sebelumnya sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Untuk itu tujuan disusunnya Renstra OPD ini adalah guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran untuk tahun 2025 sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
1	Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	59	60	61
		Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	86,79	87,05	87,30
2	Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku		Nilai LAKE	80,5	87,5	87,5
		Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	70,5	71	71

Sumber data : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2028	TARGET TAHUN 2029
1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	97,88	97	97,30	97,50	98
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68,5	69	69,5	70	70,5
		Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	74	75	76	77	78
		Meningkatnya konservasi, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	83,08	83,5	84	84,5	85

Sumber data : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Pada Tahun Anggaran 2025 program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah seperti tersebut dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	96,80	1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	74
2	Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	83,08	2	Meningkatnya Konservasi, Pembinaan dan Penataan Arsip Secara Baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	83,08
				3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68,5

Sumber data : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

Berdasarkan Tabel diatas tentang Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, terdapat penyesuaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang disesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan fokus pencapaian kinerja yang lebih terukur dan relevan dengan kondisi aktual.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (Perubahan-DPPA) III APBD setelah APBD-P 2025 yang disahkan pada Bulan November 2025, dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,396,873,900	4,184,482,848
2	Pembinaan Perpustakaan	1,329,195,200	949,282,025
3	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	101,377,050	101,377,050
4	Pengelolaan Arsip	50,033,450	15,667,850
5	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	46,411,060	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media transparansi pertanggungjawaban kepada seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, yang menjadi tolak ukur kinerja jajaran Pemerintah yang menjawab capaian kinerja pada 1 (satu) tahun periode pelaksanaan. Laporan Kinerja ini merupakan suatu implementasi kebijakan Pemerintah Daerah, yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan pemerintahan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Renstra 2024-2026

A. Capaian Tujuan dan Sasaran

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja. Pada tahun anggaran 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis yang sesuai dengan dokumen Renstra 2024-2026. Capaian kinerja tersebut sebagaimana disajikan dalam LKjIP Tahun 2025 membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan hasil pengukurannya dan target kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang
berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	96,80	30,74	31,76%
2.	Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	83,08	84,55	101,77%

Sumber data : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Sasaran 1 : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Minat Baca Masyarakat” dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	96,78	96,80	30,74	31,76%

Pada tahun ini, Perpustakaan memberikan instrumen dan metodologi terbaru. Pengukuran IPLM saat ini lebih menekankan pada dimensi kinerja dengan bobot 70 persen, sedangkan dimensi kepatuhan fisik menyumbang 30 persen.

Pendekatan pengukuran kini difokuskan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah, bukan lagi sekadar agregat wilayah. Nilai yang tertera adalah

representasi faktual berbasis data validasi lapangan, sehingga tidak dapat dibandingkan antar wilayah.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sangat jauh dari target yang telah ditetapkan hal ini terjadi dikarenakan terjadi perubahan dalam instrument penilaian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Adapun dalam Upaya pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program Pembinaan Perpustakaan yang diharapkan dapat menunjang peningkatan pelayanan Perpustakaan.

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.949.282.025,-	
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp. 101.377.050,-	
Total		Rp.1.050.659.075,-	

Sasaran 2 : Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD” dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Rata-rata Nilai LAKI	83,03	83,08	84,55	101,77%

Sumber data : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan indikator Rata-rata Nilai LAKI OPD untuk tahun 2025 target 83,08 dengan realisasi tahun 2025 yaitu 84,55 (101,77%). Rata-rata Nilai LAKI OPD ini merupakan hasil pengawasan kearsipan pada OPD-OPD yang ada di kota Padang Panjang yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya Bidang Kearsipan. Tingginya realisasi Rata-rata Nilai LAKI OPD menandakan telah tingginya kesadaran OPD-OPD dalam mengelola arsip yang ada di OPDnya.

Adapun Program yang menunjang keberhasilan untuk pencapaian target Rata-rata Nilai LAKI OPD adalah Program Pengelolaan Arsip dengan anggaran sebesar Rp15.667.850,-. Walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas diharapkan tidak menghambat pelaksanaan pengawasan arsip ke OPD-OPD.

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Pengelolaan Arsip	Rp15.556.850,-	
Total		Rp15.556.850,-	

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun lalu sesuai dengan Sasaran pada Renstra 2024-2026 dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang
berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	86,97	88,22	101,44%	86,79	97,68	112,55%	97,88	30,74	31,41%	
2.	Rata-rata Nilai LAKI OPD	n/a	73,47	n/a	70,5	83,03	117,77%	83,08	84,55	101,77%	

Sumber Data: LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2023, 2024 dan 2025

Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target pada akhir periode Renstra OPD Tahun 2024-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1.

Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target akhir renstra
Berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	87,30	30,74	35,21%
2.	Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	71	84,55	119,08%

Sumber Data: Renstra 2024-2026, Perjanjian Kinerja dan IKU 2024-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

Realisasi kinerja tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang dengan realisasi target nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional
1.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	30,74	n/a
2.	Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	84,55	n/a

Sumber Data: Renstra 2024-2026, Perjanjian Kinerja dan IKU 2024-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat karena system penilaian baru maka Perpustnas belum menentukan target atas penilaian tersebut. Sedangkan untuk Rata-rata Nilai LAKI OPD merupakan penilaian pengawasan kearsipan yang dilakukan pada OPD sehingga tidak terdapat nilai LAKI nasional.

3.1.2 Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan Renstra 2025-2029

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja. Pada tahun anggaran 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yang sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029. Capaian kinerja tersebut sebagaimana disajikan dalam LKjIP Tahun 2025 membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan hasil pengukurannya dan target kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang
berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68,5	Hasil Belum Keluar	n/a
2.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	74	70,99	95,93%
3.	Meningkatnya konservasi, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	83,08	84,55	101,77%

Sumber data : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66,75	68,5	Hasil belum keluar	n/a

Penilaian AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan oleh inspektorat dengan 4 Komponen utama penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah:

- 1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%)
- 2) Pengukuran Kinerja (bobot 30%)
- 3) Pelaporan Kinerja (bobot 15%)
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 belum ada hasilnya karena masih dalam evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang.

Adapun dalam Upaya pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat meningkatkan nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.184.482.848,-	
Total		Rp4.184.482.848,-	

Sasaran 2 : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Minat Baca Masyarakat” dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,47	74	70,99	95,93%

Pada tahun ini, Perpustnas memberlakukan instrumen dan metodologi terbaru. Untuk TKM, penilaian difokuskan pada tiga tahap aktivitas membaca: pra membaca (15 persen), saat membaca (50 persen), dan pasca membaca (35 persen).

Pendekatan pengukuran kini difokuskan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah, bukan lagi sekadar agregat wilayah. Nilai yang tertera adalah representasi faktual berbasis data validasi lapangan, sehingga tidak dapat dibandingkan antar wilayah.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dibawah target yang telah ditetapkan hal ini terjadi dikarenakan terjadi perubahan dalam instrument penilaian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Adapun dalam Upaya pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program Pembinaan Perpustakaan yang diharapkan dapat menunjang peningkatan pelayanan Perpustakaan.

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.949.282.025,-	
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp. 101.377.050,-	
Total		Rp.1.050.659.075,-	

Sasaran 2 : Meningkatnya konservasi, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya konservasi, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD” dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Rata-rata Nilai LAKI	83,03	83,08	84,55	101,77%

Sumber data : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan indikator Rata-rata Nilai LAKI OPD untuk tahun 2025 target 83,08 dengan realisasi tahun 2025 yaitu 84,55 (101,77%). Rata-rata Nilai LAKI OPD ini

merupakan hasil pengawasan kearsipan pada OPD-OPD yang ada di kota Padang Panjang yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya Bidang Kearsipan. Tingginya realisasi Rata-rata Nilai LAKI OPD menandakan telah tingginya kesadaran OPD-OPD dalam mengelola arsip yang ada di OPDnya.

Adapun Program yang menunjang keberhasilan untuk pencapaian target Rata-rata Nilai LAKI OPD adalah Program Pengelolaan Arsip dengan anggaran sebesar Rp15.667.850,-. Walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas diharapkan tidak menghambat pelaksanaan pengawasan arsip ke OPD-OPD.

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Pengelolaan Arsip	Rp15.556.850,-	
Total		Rp15.556.850,-	

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun lalu sesuai dengan Sasaran pada Renstra 2025-2029 dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang
berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	n/a	71,15	n/a	n/a	66,75	n/a	68,5	Hasil belum keluar	n/a	
2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	46	67,81	147%	59	72,47	122,83%	74	70,99	95,93%	
3	Rata-rata Nilai LAKI OPD	n/a	73,47	n/a	70,5	83,03	117,77%	83,08	84,55	101,77%	

Sumber Data: LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2023, 2024 dan 2025

Realiasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target pada akhir periode Renstra OPD Tahun 2025-2029 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target akhir renstra
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	77,7	Hasil belum keluar	n/a
2.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	78	70,99	91,01%
3.	Meningkatnya konservasi, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	86	84,55	98,31

Sumber Data: Renstra 2025-2029, Perjanjian Kinerja dan IKU 2025-2029 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

Realisasi kinerja tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang dengan realisasi target nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional
1.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Belum Keluar	Tidak ada penilaian
2.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	70,99	n/a
3.	Meningkatnya konservasi, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	84,55	n/a

Sumber Data: Renstra 2025-2029, Perjanjian Kinerja dan IKU 2025-2029 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Nilai AKIP Dinas Perpustakaan tidak memiliki penilaian pada tingkat nasional, Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat karena sistem penilaian baru maka Perpustakaan belum menentukan target atas penilaian tersebut. Sedangkan untuk Rata-rata Nilai LAKI OPD merupakan penilaian pengawasan kearsipan yang dilakukan pada OPD sehingga tidak terdapat nilai LAKI nasional.

B. Capaian Program/Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025, berikut uraian capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang untuk tahun 2025:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Rp4.184.482.848,-

Dengan total anggaran sebesar Rp4.184.482.848,- dengan realisasi sebesar Rp3.914.700.390,- atau (93,55%) dengan rincian kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp3.358.654.693,-
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp3.358.654.693,-

- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp39.811.305,-
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp1.748.000,-
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp12.002.650,-
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Rp5.783.400,-
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp23.249.000,-
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp0,-
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp0,-
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp193.235.200,-
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp517.900,-
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp29.895.205,-
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp642.042.000,-
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp110.590.000,-
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp36.646.000,-
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp65.704.000,-
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Rp8.240.000,-
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp0,-
- 2. Program Pembinaan Perpustakaan Rp949.282.025,-
 - a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp245.240.650,-
 - 1) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Rp48.622.850,-
 - 2) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Rp28.165.900,-
 - 3) Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Rp158.471.900,-

- 4) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Rp9.980.000,-
- b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp704.041.375,-
 - 1) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Rp12.197.425,-
 - 2) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp39.750.000,-
 - 3) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Rp463.328.850,-
 - 4) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Rp188.765.100,-
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuno Rp101.377.050,-
 - a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Rp101.377.050,-
 - 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno Rp101.377.050,-
4. Program Pengelolaan Arsip Rp15.667.850,-
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Rp15.667.850,-
 - 1) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Rp15.667.850,-
 - b. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Rp0,-
 - 1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN Rp0,-
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 - a. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Secara Berkala Kabupaten/Kota Rp0,-
 - 1) Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Rp0,-
 - b. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Rp0,-
 - 2) Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Rp0,-

Adapun realisasi program dan kegiatan pada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Rp5.025.198.217,-

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp3.229.281.608,-

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar
Rp3.229.281.608,-

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan seluruh ASN di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp3.229.281.608,- (96,15%). Dari kegiatan ini telah dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan termasuk gaji ke-13 dan gaji ke -14.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp39.811.305,-

1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sebesar Rp1.624.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi Keuangan sebesar Rp1.624.000,- (92,91%) Dari Kegiatan ini dihasilkan perlengkapan penerangan kantor seperti bola lampu, kabel-kabel listrik dan peralatan listrik lainnya.

2. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp10.586.600,-

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan computer dan perabot kantor. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp10.586.600,- (88,20%). Kegiatan ini dibutuhkan untuk menunjang kelancaran operasional dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.

3. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Rp4.891.900,-

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%

sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp4.891.900,- (84,59%). Dalam kegiatan ini dihasilkan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, seperti cetak map, jilid laporan cetak spanduk, dan fotocopy.

4. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp22.708.805,-

Kegiatan ini bertujuan untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah Sumatera Barat dan di luar provinsi Sumatera Barat dan tersedianya anggaran makan minum rapat untuk menunjang pelaksanaan rapat. Realisasi fisik dari pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah 100%, realisasi fisik makan dan minum rapat sebesar 100%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp22.708.805,- (97,68%). Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dihasilkan keikutsertaan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah dan juga dapat dihasilkan penyelenggaraan rapat-rapat internal kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp0,-

1. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp0,-

Kegiatan ini semula bertujuan untuk pengadaan laptop untuk menunjang kinerja pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang. Akan tetapi pengadaan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp577.571.177,-

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat Sebesar Rp510.000,-

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa surat menyurat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi Keuangan Rp510.000,- (98,47%). Kegiatan ini ditujukan untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan terutama dibagian keuangan seperti pembelian materai dan cek.

2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sebesar Rp27.094.252,-

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan Rp27.094.252,- (90,63%). Kegiatan ini ditujukan untuk pembayaran tagihan telepon, air dan listrik untuk menunjang urusan kantor.

3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp549.966.925,-

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Realisasi fisik untuk jumlah pegawai honorer dan tenaga harian lepas yang mendapatkan gaji 100% sedangkan realisasi keuangan Rp549.966.925 (85,66%). Kegiatan ini untuk membayar gaji, pembayaran iuran kesehatan, kecelakaan dan kematian pegawai honorer, tenaga keamanan, tenaga administrasi dan tenaga sopir di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.

- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp68.036.300,-

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp17.403.400,-

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan kegiatan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp17.403.400,- (47,49%). Realisasi keuangan kegiatan ini kurang dari 85% karena tidak banyak kendala pada kendaraan tersebut dan untuk anggaran asuransi barang milik daerah yang telah dianggarkan tidak teralisasi karena untuk tahun 2026 kendaraan dinas direncanakan disewa.

2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp43.671.900,-

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan hanya sebesar Rp43.671.900,- (66,47%). Realisasi keuangan kegiatan ini kurang dari 85%, hal ini dikarenakan adanya mutasi kurang kendaraan antar OPD terutama kendaraan roda dua yang semula 7 unit menjadi 3 unit. Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembayaran jasa service perbaikan kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 unit maupun kendaraan dinas roda dua sebanyak 3 unit, dan untuk penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran pajak kendaraan dinas.

3. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp6.961.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya peralatan yang mendukung untuk jalannya operasional kegiatan kantor. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp6.961.000,- (84,48%). Realisasi keuangan kurang dari 85% dikarenakan pada tahun 2025 tidak ada peralatan yang rusak berat. Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain perbaikan laptop, Printer dan komputer untuk penunjang lancarnya operasional kantor.

4. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Rp0,-

Kegiatan ini semula bertujuan untuk pemeliharaan geung dan halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menunjang kenyamanan tempat kerja. Akan tetapi pemeliharaan ini tidak dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

II. Program Pembinaan Perpustakaan Rp885.251.545,-

a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Rp204.352.830,-

1. Subkegiatan penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
Rp20.123.845,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp20.123.845,- (41,39%). Hasil Dari kegiatan ini adalah terkumpulnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk kemajuan perpustakaan. Realisasi di bawah target pada Subkegiatan ini dikarenakan dengan realisasi yang hanya Rp20.123.845,- telah mampu mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

2. Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Rp26.243.100,-

Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi Keuangan sebesar Rp26.243.100,- (93,17%). Kegiatan ini dalam rangka pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka demi keberagaman koleksi Perpustakaan.

3. Subkegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat kabupatenKota Rp149.680.885,-

Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp149.680.885,- Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan jumlah koleksi Perpustakaan khas daerah di Padang Panjang.

4. Subkegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Rp8.305.000,-

Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp8.305.000,- (83,22%). Realisasi keuangan kurang dari 85% dikarenakan tidak ada kendala yang besar dalam pemeliharaan Perpustakaan Elektronik. Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK.

b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp680.898.715,-

a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Rp204.352.830,-

1. Subkegiatan penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
Rp20.123.845,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp20.123.845,- (41,39%). Hasil Dari kegiatan ini adalah terkumpulnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk kemajuan perpustakaan. Realisasi di bawah target pada Subkegiatan ini dikarenakan dengan realisasi yang hanya Rp20.123.845,- telah mampu mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

2. Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Rp26.243.100,-

Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi Keuangan sebesar Rp26.243.100,- (93,17%). Kegiatan ini dalam rangka pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka demi keberagaman koleksi Perpustakaan.

3. Subkegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat kabupatenKota Rp149.680.885,-

Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp149.680.885,- Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan jumlah koleksi Perpustakaan khas daerah di Padang Panjang.

4. Subkegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Rp8.305.000,-

Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp8.305.000,- (83,22%). Realisasi keuangan kurang dari 85% dikarenakan tidak ada kendala yang besar dalam pemeliharaan Perpustakaan Elektronik. Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK.

b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp680.898.715,-

1. Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Rp12.000.000,-

Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp12.000.000,- (98,38%). Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Padang Panjang.

2. Subkegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp38.350.000,-

Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp38.350.000,- (96,48%). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga sarana perpustakaan yang menunjang kinerja Perpustakaan seperti pemeliharaan mobil Perpustakaan keliling.

3. Subkegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Rp443.972.090,-

Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp443.972.090,- (95,82%). Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya pemberian penghargaan bagi orang yang berprestasi dibidang literas seperti mengikuti lomba bertutur tingkat nasional.

4. Subkegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Rp186.576.625,-

Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp186.576.625,- (98,84%). Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya lomba-lomba dibidang Perpustakaan serta terlaksananya bimtek-bimtek guna pembudayaan gemar membaca.

III. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

- a. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Rp78.799.822,-

1. Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno Rp78.799.822,-

Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp78.799.822,- (77,73%). Kegiatan ini bertujuan untuk menelusuri naskah-naskah kuno yang ada di masyarakat.

IV. Program Pengelolaan Arsip Rp13.451.050,-

a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Rp13.451.050,-

1. Subkegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Rp13.451.050,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp13.451.050,- (85,85%). Hasil dari kegiatan adalah terlaksananya pengawasan arsip pada OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sehingga tercapainya Rata-rata Nilai LAKI OPD yang merupakan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

b. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Rp0,-

1. Subkegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp0,-

Realisasi fisik dari kegiatan 0% sedangkan Realisasi Keuangan sebesar Rp0,- (0%). Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

V. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Rp0,-

a. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Rp0,-

1. Subkegiatan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp0,- (0%). Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

b. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Rp0,-

1. Subkegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Keabsahan Arsip Rp0,-

Realisasi fisik dari kegiatan 0% sedangkan Realisasi Keuangan sebesar Rp0,- (0%). Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi, dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2025. Semua sasaran tersebut didukung dengan program dan kegiatan yang ditetapkan targetnya pada tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

TABEL 3.9
Realisasi anggaran tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Sesuai PK Perubahan	Anggaran Sesuai LRA	Realisasi Sesuai LRA
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,184,482,848	4,184,482,848	3.914.700.390
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,358,654,693	3,358,654,693	3,229,281,608
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,358,654,693	3,358,654,693	3,229,281,608
	Belanja Gaji Pokok ASN	1,359,371,516	1,359,371,516	1,311,735,813
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	87,118,969	87,118,969	81,886,448
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	119,383,950	119,383,950	107,815,000
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	29,018,800	29,018,800	11,760,000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35,088,150	35,088,150	34,910,000
	Belanja Tunjangan Beras ASN	57,940,345	57,940,345	56,342,226
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	68,490,953	68,490,953	67,681,560
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19,351	19,351	19,252
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	104,273,402	104,273,402	97,499,524
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2,795,338	2,795,338	2,681,010
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8,386,052	8,386,052	8,043,069
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,486,767,867	1,486,767,867	1,448,907,706
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42,783,050	42,783,050	39.811.305
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,748,000	1,748,000	1,624,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,748,000	1,748,000	1,624,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,002,650	12,002,650	10,586,600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	323,340	323,340	323,140
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,755,000	4,755,000	4,497,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,703,640	3,703,640	3,402,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,358,170	2,358,170	1,834,460
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	262,500	262,500	-
	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	600,000	600,000	530,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,783,400	5,783,400	4,891,900
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5,783,400	5,783,400	4,891,900
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23,249,000	23,249,000	22,708,805
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	405,000	405,000	350,805
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	625,000	625,000	294,000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,219,000	22,219,000	22,064,000
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672,455,105	672,455,105	577,571,177

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	517,900	517,900	510,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	517,900	517,900	510,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,895,205	29,895,205	27,094,252
	Belanja Tagihan Telepon	419,000	419,000	412,284
	Belanja Tagihan Air	4,956,000	4,956,000	4,027,900
	Belanja Tagihan Listrik	24,520,205	24,520,205	22,654,068
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642,042,000	642,042,000	549,966,925
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	487,200,000	487,200,000	407,200,000
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	61,720,000	61,720,000	59,880,000
	Belanja Jasa Tenaga Supir	79,940,000	79,940,000	71,060,000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8,700,000	8,700,000	8,700,000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1,818,000	1,818,000	1,389,720
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2,664,000	2,664,000	1,737,205
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110,590,000	110,590,000	69,380,300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36,646,000	36,646,000	17,403,400
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13,950,000	13,950,000	2,229,700
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9,696,000	9,696,000	8,494,700
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5,000,000	5,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8,000,000	8,000,000	6,679,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,704,000	65,704,000	43,671,900
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5,250,000	5,250,000	4,998,100
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	48,904,000	48,904,000	27,227,500
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11,550,000	11,550,000	11,446,300
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,240,000	8,240,000	6,961,000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5,840,000	5,840,000	5,081,000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2,400,000	2,400,000	1,880,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	-	-	-
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	949,282,025	949,282,025	885,251,545
A	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	245,240,650	245,240,650	204,352,830
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	48,622,850	48,622,850	20,123,845
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	394,800	394,800	189,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	491,050	491,050	420,900
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16,137,000	16,137,000	3,213,945

	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,600,000	3,600,000	3,200,000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,000,000	28,000,000	13,100,000
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	28,165,900	28,165,900	26,243,100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	982,900	982,900	981,600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7,740,000	7,740,000	7,605,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,948,000	1,948,000	974,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,995,000	4,995,000	4,682,500
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12,000,000	12,000,000	11,500,000
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	500,000	500,000	500,000
	Belanja Modal Mebel	-	-	-
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-
	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	158,471,900	158,471,900	149,680,885
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	789,600	789,600	504,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	22,837,300	22,837,300	19,246,305
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30,495,000	30,495,000	27,530,580
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20,400,000	20,400,000	18,450,000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6,750,000	6,750,000	6,750,000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,000,000	33,000,000	33,000,000
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	40,000,000	40,000,000	40,000,000
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	9,980,000	9,980,000	8,305,000
	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	250,000	250,000	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film	200,000	200,000	-
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8,030,000	8,030,000	8,005,000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1,500,000	1,500,000	300,000
B	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	704,041,375	704,041,375	680,898,715
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	12,197,425	12,197,425	12,000,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25	25	-

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	197,400	197,400	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12,000,000	12,000,000	12,000,000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-	-
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39,750,000	39,750,000	38,350,000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel	4,400,000	4,400,000	4,400,000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1,830,000	1,830,000	1,525,000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	3,520,000	3,520,000	2,425,000
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	463,328,850	463,328,850	443,972,090
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	526,400	526,400	504,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	38,912,950	38,912,950	33,761,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	37,500,000	37,500,000	37,462,500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	800,000	800,000	577,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	45,500	45,500	45,500
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37,494,000	37,494,000	35,527,590
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,250,000	4,250,000	3,600,000
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	22,400,000	22,400,000	21,750,000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4,500,000	4,500,000	4,500,000
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15,000,000	15,000,000	9,994,500
	Belanja Sewa Mebel	180,000,000	180,000,000	179,000,000
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	50,000,000	50,000,000	49,000,000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	55,400,000	55,400,000	54,500,000
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16,500,000	16,500,000	13,750,000
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	188,765,100	188,765,100	186,576,625
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32,816,000	32,816,000	32,815,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	460,600	460,600	441,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9,136,000	9,136,000	9,136,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	-	-	-

	Bahan Komputer			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1,200,000	1,200,000	1,100,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	45,500	45,500	27,300
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840,000	840,000	833,700
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35,217,000	35,217,000	34,673,625
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16,750,000	16,750,000	15,750,000
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9,000,000	9,000,000	9,000,000
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2,500,000	2,500,000	2,500,000
	Belanja Sewa Hotel	1,300,000	1,300,000	800,000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,000,000	25,000,000	25,000,000
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	19,500,000	19,500,000	19,500,000
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	101,377,050	101,377,050	78,799,822
A	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	101,377,050	101,377,050	78,799,822
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	101,377,050	101,377,050	78,799,822
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	329,000	329,000	315,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400,050	400,050	342,900
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	924,000	924,000	917,070
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4,704,000	4,704,000	4,704,000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,600,000	3,600,000	3,400,000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17,500,000	17,500,000	17,500,000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,420,000	47,420,000	36,820,852
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,500,000	26,500,000	14,800,000
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	15,667,850	15,667,850	13,451,050
A	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	15,667,850	15,667,850	13,451,050
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	15,667,850	15,667,850	13,451,050
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	354,800	354,800	353,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	622,000	622,000	605,000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,971,050	7,971,050	6,893,250
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	450,000	450,000	375,000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,270,000	6,270,000	5,224,800
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-
B	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-

	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-
	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-	-
A	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-	-
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	-	-	-
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-
	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	-	-	-
B	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	-
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-
		5,250,809,773	5,250,809,773	4.892.202.807

Sumber data : DPA Tahun 2025 dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Analisis

1) Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Analisis efisiensi sumber daya keuangan merupakan langkah penting bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan anggaran telah menghasilkan capaian kinerja yang maksimal. Dalam proses ini, efisiensi diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran yang dikeluarkan dengan target program yang berhasil dicapai.

Melalui pengelolaan keuangan yang cermat, setiap rupiah yang dialokasikan diharapkan dapat mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi secara tepat sasaran, tanpa mengurangi kualitas pengawasan maupun akuntabilitas birokrasi yang ada. Adapun uraian efisiensi terhadap sumberdaya keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut

Tabel 3.10

Analisis atas Efisiensi Sumberdaya Keuangan terhadap Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran PK 2025	Realisasi Anggaran	Sisa	% Capaian	Tingkat Efisiensi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	4.184.482.848	3.914.700.390	269.782.458	93,55%	6,45%	100%
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	949.282.025	885.251.545	64.030.480	93,25%	6,75%	100%
3.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	101.377.050	78.799.822	22.577.228	77,73%	22,27%	100%
4.	Program Pengelolaan Arsip	15.677.850	13.451.050	2.226.800	85,80%	14,20%	100%
Rata-Rata Tingkat Efisiensi						12,42%	100%

Berdasarkan paparan data pada tabel analisis diatas, sederhananya dikategorikan Tingkat efisiensi program tersebut berdasarkan kriteria.

1. Persentase <10%, Kategori Sangat Efisien, Penggunaan anggaran sudah optimal, terdapat penghematan yang signifikan tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja;
2. Persentase 10%-20%, Kategori Efisien, Penggunaan anggaran sudah sesuai dengan perencanaan dan terdapat sisa anggaran yang wajar dari hasil optimalisasi
3. Persentase 21%-30%, Kategori Kurang Efisien, Terdapat selisih anggaran yang cukup besar; dan perlu dilakukan evaluasi apakah target pencapaian dalam perencanaan awal terlalu tinggi (*overbudgeting*)
4. Persentase >30%, Kategori tidak efisien, selisih anggaran terlalu besar; menunjukkan perencanaan yang kurang akurat atau banyak kegiatan yang tidak berjalan semestinya.

Agar hasil analisis ini objektif, maka Tingkat efisiensi anggaran disandingkan dengan capaian kinerja ada tahun 2025 dengan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis Tingkat efisiensi pelaksanaan 4 program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota

Padang Panjang dikategorikan Efektif dan Efisien, Dimana Tingkat efisiensi program berada di atas 10% dengan capaian kinerja 100%.

2) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan Analisa melalui 2 (dua) aspek yaitu personal dan anggaran dengan membandingkan capaian kinerja. Dari segi personil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang sejumlah 34 ASN (PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu) yang terdiri atas 24 Orang PNS, 2 PPPK dan 8 PPPK Paruh Waktu. Sesuai dengan formasi jabatan fungsional Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang masih terdapat kekurangan berdasarkan usulan kebutuhan formasi dengan uraian sebagai Berikut:

Tabel 3. 11

Jumlah Fungsional Aparatur Perpustakaan dan Kearsipan
berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Uraian	Kebutuhan	Jumlah Saat ini	Kekurangan
Pustakawan	5	4	(1)
Arsiparis	3	2	(1)
Total	8	6	(2)

Sumber Data: Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Selain itu dari sisi Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian kinerja tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3. 12

Realisasi Anggaran berdasarkan Program

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran pada DPA (Rp.)	Realisasi Tahun 2025 (Rp.)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	4.184.482.848	3.914.700.390	93,55%
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	949.282.025	885.251.545	93,25%
3.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	101.377.050	78.799.822	77,73%
4.	Program Pengelolaan Arsip	15.677.850	13.451.050	85,80%
Total		5.250.809.773	4.892.202.807	93,17%

Sumber Data: LRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas dapat ditarik suatu analisis efisiensi terhadap sumber daya manusia, berdasarkan aspek terhadap personil sebagai berikut:

- 1) Kuantitas SDM belum memadai, tersedianya 34 ASN dengan 24 PNS, 2 PPPK dan 8 PPPK PW dengan hanya total 4 fungsional Perpustakaan dan 2 Fungsional Arsiparis mengakibatkan beban kerja pelayanan perpustakaan dan Kearsipan meningkat dan cakupan layanan terbatas.
- 2) Rasio efisiensi rendah dimana jika dilihat dari kuantitas sekilas 6 Orang fungsional perpustakaan dan kearsipan yang melayani masyarakat dan OPD menyebabkan terjadinya tumpeng tindih pekerjaan pelayanan, yang berdampak terhadap keefektif dan keoptimalan pelaksanaan kinerja.

3) Analisis atas Efisiensi Sarana Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan operasional di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, dalam pelaksanaannya masih terbilang belum cukup memadai. Mengingat banyaknya pengunjung yang datang ke Perpustakaan dan Kearsipan sehingga diperlukan perangkat yang cukup memadai dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kondisi tersebut dianalisis terhadap efisiensi sarana prasarana Inspektorat Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 3.3

Analisis Efisiensi Sarana Prasarana

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Tersedianya perangkat sarana prasarana pelayanan (Laptop, Printer, Perangkat Elektronik, Kendaraan operasional) dalam	Perangkat Sarana dan Prasarana yang tersedia belum sebagian besar belum memenuhi spek yang mendukung pelaksanaan kegiatan	Kekurangan perangkat Sarana dan Prasarana yang memiliki spek sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan. Seperti laptop spek tinggi,	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai dengan spek yang dibutuhkan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
pelaksanaan kegiatan pelayanan perpustakaan dan kearsipan	pelayanan	printer laserjet, kendaraan operasional lapangan yang cukup.	

Sumber Data: Disusun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, Tahun 2025

4) Analisis Penyebab Kegagalan/Keberhasilan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang untuk tahun 2025 rata-rata belum optimal. Sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja dengan sasaran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2025-2029. Hal tersebut didorong dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja:

- 1) Struktur organisasi yang sudah terorganisir dan jelas, dikuatkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.
- 2) Terdapatnya regulasi dan sistem penilaian Akuntabilitas Kinerja yang tertarget memaksa instansi untuk bekerja dengan berbasis kinerja;
- 3) Terdapatnya Perencanaan strategis dan operasionalisasi yang jelas (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Aksi)
- 4) Dukungan anggaran yang cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan;
- 5) Komitmen Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang dalam mendukung pencapaian kinerja.

Faktor Kegagalan dan Penurunan Kinerja

- 1) Belum optimalnya Komposisi Kebutuhan Aparatur Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang;
- 2) Belum meratanya kompetensi yang dimiliki Aparatur dalam pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang;

- 3) Belum maksimalnya anggaran dari APBD dialokasikan untuk anggaran urusan Perpustakaan dan Kearsipan;
- 4) Belum disesuaikan dokumen perencanaan saat penyusunan perubahan dokumen perencanaan sehingga berpengaruh negatif terhadap capaian kinerja saat pelaporan nanti;
- 5) Dinamisnya kebijakan pusat mengakibatkan beberapa capaian kinerja belum maksimal, contohnya pada penilaian di bidang perpustakaan dan kearsipan, kebijakan pusat menggunakan kebijakan baru dan instrument baru dalam penilaian sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum memahami kebijakan baru tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum tidak ada kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Indeks Pembangunan Literasi dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat rendah dikarenakan IPLM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen sedangkan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen sedangkan NTGM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan dimensi pasca membaca 35 persen.

Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan.

Secara umum kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025 telah dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat tahun 2025 hasilnya 70,99 dengan target yang telah ditetapkan yaitu 74.
- b. Target Rata-rata Nilai LAKI 83,08 dengan realisasi 84,55.
- c. Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hasil tahun 2025 belum keluar dengan target tahun 2025 68,5

Faktor penghambat keberhasilan di Bidang Perpustakaan:

1. Maraknya penggunaan teknologi dalam masyarakat seperti penggunaan gawai dan internet sehingga menghambat minat baca masyarakat.

2. Rendahnya kemampuan intelegensi masyarakat sehingga penyerapan literasi tergolong lemah.
3. Rendahnya tingkat akreditasi perpustakaan sekolah karena faktor kurangnya sarana prasarana pada perpustakaan sekolah.
4. Terjadi perubahan nilai IPLM yang sangat signifikan karena Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah melakukan analisis dan melakukan perubahan rumus dan instrumen pengukuran IPLM dan TKM yang disesuaikan dengan kewenangan pada Pemerintah Daerah. Adapun pokok perubahan dimaksud meliputi:
 - Penyesuaian metodologi pengukuran IPLM dan TKM yang disesuaikan berdasarkan kewenangan daerah.
 - Integrasi indikator baru yang merefleksikan perkembangan ketersediaan anggaran, kolaborasi/kerjasama dengan mitra, dokumen kebijakan, dan perilaku literasi masyarakat;
 - Penyesuaian dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan dalam penghitungan IPLM dan TKM 4. Penyelarasan bobot dimensi dalam penghitungan IPLM antara kepatuhan dan kinerja guna memastikan akurasi, reliabilitas, serta kesesuaian dengan arah pembangunan nasional.
 - Penyelarasan bobot dimensi dalam penghitungan TKM antara pra membaca, saat membaca, dan pasca membaca guna memastikan akurasi, reliabilitas, serta kesesuaian dengan arah pembangunan nasional.

Faktor pendorong keberhasilan di Bidang Kearsipan :

- Adanya peningkatan nilai LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal) di Lingkungan Kota Padang Panjang
- Terlaksananya fungsi Lembaga Kearsipan Daerah Kota Padang Panjang baik dari segi pengelolaan kearsipan maupun dari segi layanan kearsipannya

Seiring dengan penyesuaian metodologi, dimensi, indikator, serta bobot penghitungan IPLM dan TKM tersebut, target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pemerintah Daerah pada urusan perpustakaan perlu dilakukan penyesuaian agar tetap relevan, terukur, dan selaras dengan kewenangan daerah serta kebijakan pembangunan nasional. Penyesuaian target IKK ini dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan antara instrumen pengukuran, capaian kinerja daerah, dan evaluasi pembangunan literasi masyarakat, sehingga hasil penilaian dapat digunakan secara optimal sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada bidang Perpustakaan tidak dapat mencapai target kinerja sedangkan pada bidang kearsipan dapat melebihi target kinerja yang telah ditetapkan tetapi masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan atau faktor penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program antara lain :

➤ Bidang Perpustakaan

1. Maraknya penggunaan teknologi dalam masyarakat seperti penggunaan gawai dan internet sehingga menghambat minat baca masyarakat.
2. Rendahnya kemampuan intelegensi masyarakat sehingga penyerapan literasi tergolong lemah.
3. Rendahnya tingkat akreditasi perpustakaan sekolah karena faktor kurangnya sarana prasarana pada perpustakaan sekolah.

➤ Bidang Kearsipan

1. Keterbatasan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan kearsipan
2. Masih kurangnya peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan kearsipan.
3. Aspek penilaian berbeda dari tahun sebelumnya.
4. Pengelolaan kearsipan masih menggunakan kebijakan lama sedangkan dalam waktu berjalan keluar kebijakan baru yang dijadikan pedoman dalam penilaian kearsipan

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

➤ Bidang Perpustakaan

1. Menciptaan inovasi yang menarik bagi masyarakat sebagai usaha menarik minat baca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan, Seperti : Mengadakan kelas kreatif, program Read A Loud, berbagai lomba serta reward kepada pemustaka terbaik.
2. Sosialisasi pada masyarakat melalui media sosial atau kunjungan langsung tentang pentingnya membaca serta manfaat yang diperoleh dari bacaan tersebut.
3. Konsolidasi dengan Dinas Pendidikan tentang perpustakaan sekolah khususnya pengadaan sarana prasarana perpustakaan serta pengusulan pustakawan khusus perpustakaan sekolah.
4. Menyesuaikan analisis dan menyesuaikan rumus dan instrumen pengukuran IPLM dan TKM yang disesuaikan dengan kewenangan pada Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam penilaian oleh Perpusnas.

➤ Bidang Kearsipan

1. Adanya dukungan anggaran dalam penyelenggaraan kearsipan
2. Melaksanakan Pelatihan atau Bimbingan Teknis Kearsipan bagi pengelola arsip/ arsiparis
3. Pengelolaan kearsipan untuk tahun berikutnya akan menyesuaikan dengan kebijakan yang terbaru.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang diharapkan dalam melakukan perencanaan penganggaran harus mengacu kepada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Untuk Bidang Perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat diharapkan terus melakukan pembaharuan baik dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Perpustakaan sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi yang berdampak kepada peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah. Selain itu terus meningkatkan jumlah layanan

kepada masyarakat melalui pelayanan pustaka keliling dan lapak baca yang bekerjasama dengan Forum Pegiat Literasi Kota Padang Panjang.

Untuk Bidang Kearsipan diharapkan terus melakukan pembinaan-pembinaan ke OPD sehingga dapat meningkatkan kesadaran OPD betapa pentingnya arsip ini dan mampu meningkatkan kinerja kearsipan di OPD. Bidang Kearsipan juga diharapkan mampu menyediakan informasi kearsipan Kota Padang Panjang.

Selain itu diharapkan juga pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang adanya penambahan penyediaan tenaga arsiparis dan pustakawan yang handal dalam pengelolaan arsip dan perpustakaan yang sesuai dengan ketentuan dan mekanisme operasional yang ada. Untuk memperoleh tenaga-tenaga yang handal dapat dilakukan berbagai upaya diantaranya perekrutan dan penempatan pegawai yang berkualifikasi kearsipan dan kepustakaan serta mengadakan dan mengikuti pelatihan dan pendidikan terhadap staf-staf yang ada. Sehingga semua staf mengetahui tata cara pengolahan arsip dan kepustakaan.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Urip Sumohardjo No. 532 Padang Panjang Telp. (0752) 485312
Email: dpk@padangpanjang.go.id Website: www.dpk.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAN KAS BARI, SE

Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA

Jabatan : P.J. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
P.J. WALIKOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA
KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG

YAN KAS BARI, SE
NIP. 19680113 199401 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG

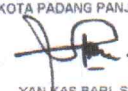
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	96,80
2	Widening of the knowledge, understanding, and skills of the community in the use of archival documents and the preservation of archival documents in accordance with the standards of archival documents in the OPD	Rata-rata Nilai LAKI-OPD	83,05

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4,396,873,900	
2	Pembinaan Perpustakaan	Rp. 1,329,195,200	
3	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 101,377,050	
4	Pengelolaan Arsip	Rp. 50,033,450	
5	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 46,411,060	

Padang Panjang, 2 Januari 2025

P.J. WALIKOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG

YAN KAS BARI, SE
NIP. 19640113 199401 1 001

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Urip Sumohardjo No. 532 Padang Panjang Telp. (0752) 485312
Email: dpk@padangpanjang.go.id Website: www.dpk.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. M. ALI TABRANI, M. Pd

Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRI ARNIS

Jabatan : WALI KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,

2025

PIHAK KEDUA
WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

PIHAK PERTAMA
PIt. KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG

Drs. M. ALI TABRANI, M. Pd
NIP. 19680922 199702 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Masyarakat	Indeks Pembangunan Masyarakat	95,80	1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Masyarakat	Nilai Target Kelembagaan Masyarakat	74,00
2	Meningkatnya kemampuan organisasi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Rata-rata Nilai IAK	83,00	2	Meningkatnya kemampuan organisasi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Nilai Akutik Organisasi Kelembagaan	89,00
				3	Meningkatnya kemampuan organisasi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Rata-rata Nilai IAK	83,00

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penyusunan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.101.132.650,00	4.101.132.650,00	
2	Pembinaan Perpustakaan	1.101.200,00	1.101.200,00	
3	Penelitian, Riset, dan Inovasi	1.101.200,00	1.101.200,00	
4	Pengelolaan Arsip	1.101.200,00	1.101.200,00	
5	Penelitian dan Penyelamatan Arsip	1.101.200,00	1.101.200,00	
	Jumlah	5.405.832.650,00	5.405.832.650,00	

WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

Padang Panjang, 2025
PR. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG

Drs. M. ALI TABRANI, M. Pd
NIP. 19680922 199702 1 001

Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2025

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG
TRIMULAN IV TAHUN 2025
Berdasarkan Renstra 2015-2019**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja pada Trimester ke-				REALISASI S/D TRIMULAN III	% CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
				I	II	III	IV					
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Mel. AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsip	68.50	-	-	-	0	0.00	0%	Hasil belum wajar		
2	Meningkatnya Minat baca Masyarakat	Naii Tingkat Kegiatan Membaca Masyarakat	74.00	0	-	0.00	70.88	70.88	50%	Terdapat perubahan nilai ILM yang sangat signifikan karena Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah melakukan analisis dan melakukan perubahan rumus dan instrumen pengukuran ILM dan TKM yang disesuaikan dengan kewenangan pada Pemerintah Daerah. Adapun pokok perubahan dimaksud meliputi: 1. Penyesuaian metodologi pengukuran ILM dan TKM yang disesuaikan berdasarkan kewenangan daerah 2. Integrasi indikator baru yang menekankan penguatan kewenangan enggaran, kuantitas/kegiatan dengan mitra, dukungan kebijakan dan perilaku lintas masyarakat 3. Penyesuaian desain, variabel, dan indikator yang digunakan dalam penghitungan ILM dan TKM 4. Penyesuaian bobot dimensi dalam penghitungan ILM antara kaputuhan dan kinerja guna memaksimalkan sumber realisasi, serta kesesuaian dengan arah pembangunan nasional 5. Penyesuaian bobot dimensi dalam penghitungan TKM antara pra membaca, saat membaca, dan pasca membaca guna memaksimalkan durasi, stabilitas serta kesesuaian dengan arah pembangunan nasional Selain dengan penyesuaian metodologi, desain, indikator, serta bobot penghitungan ILM dan TKM tersebut, target indikator Kinerja Kunci (KKI) Pemerintah Daerah pada urusan perpustakaan perlu dilakukan penyesuaian agar tetap relevan, akurat, dan selaras dengan kewenangan daerah serta kebijakan pembangunan nasional. Penyesuaian target KKI ini dimaksudkan untuk memaksimalkan keterambungan antara instrumen pengukuran, capaian kinerja daerah, dan evaluasi pembangunan literasi masyarakat, sehingga hasil penilaian dapat digunakan secara optimal sebagai dasar perencanaan, penganggaran dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah		

3	Monitoring Konservasi Pembinaan dan Perawatan Araip secara Berkala di OPD	Revisi-rata Nila LAKI OPD	83.08	0	0	0	84.55	84.55	102%			
---	---	---------------------------	-------	---	---	---	-------	-------	------	--	--	--

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI S/D TWM (Rp)	%	KET
1	Program:	Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,194,462,848	3,914,790,390	83.56%	
	Kegiatan:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,358,854,683	3,229,281,608	96.15%	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,358,854,693	3,229,281,608	96.15%	
	Kegiatan:	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42,783,659	39,811,305	83.05%	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,749,000	1,624,000	92.91%	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,962,650	10,586,600	88.20%	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	5,783,400	4,891,900	84.59%	
	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23,249,000	22,708,805	97.68%	
	Kegiatan:	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0.00%	
	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0.00%	
	Kegiatan:	Penyediaan Jasa Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah	672,455,185	577,571,177	85.89%	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menurut	517,900	510,000	98.47%	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,695,205	27,094,252	90.83%	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642,042,000	549,966,925	85.66%	

	Kegiatan:	Pemeliharaan Sarung MBW Daerah Penyangg Urusan Pemerintahan Daerah	110.590.900	98.036.300	61,52%	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.646.000	17.403.400	47,49%	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.704.000	43.671.900	66,47%	
	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.240.000	6.961.000	84,48%	
	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0,00%	
	Program:	Pembinaan Perpustakaan	949.282.625	885.251.545	93,25%	
	Kegiatan:	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	245.240.650	204.352.830	83,33%	
	Sub Kegiatan	Penyusunan Data dan Inventaris Perpustakaan	48.622.850	20.123.843	41,39%	
	Sub Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	28.165.900	26.243.100	93,17%	
	Sub Kegiatan	Pengembangan Kekayaan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	158.471.900	149.990.885	94,66%	
	Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	9.980.900	8.305.000	83,22%	
	Kegiatan:	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	704.041.775	680.898.715	96,71%	
	Sub Kegiatan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	12.197.425	12.000.000	98,38%	

	Sub Kegiatan	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Merajut Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39.750.000	38.350.000	96,48%	
	Sub Kegiatan	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	463.328.850	443.972.050	95,82%	
	Sub Kegiatan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	188.765.100	186.576.625	98,84%	
1	Program	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	101.377.050	78.798.822	77,73%	
	Kegiatan	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	101.377.050	78.798.822	77,73%	
	Sub Kegiatan	Pengkajian Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pencatatan Naskah Kuno	101.377.050	78.798.822	77,73%	
2	Program	Pengelolaan Arsip	13.667.850	13.451.050	98,50%	
	Kegiatan	Pengelolaan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	13.667.850	13.451.050	98,50%	
	Sub Kegiatan	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	13.667.850	13.451.050	98,50%	
	Kegiatan	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	0,00%	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-	-	0,00%	
3	Program	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-	-	0,00%	

Kegiatan:	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berakibat Kabupaten/Kota	-	-	0.00%	
Sub Kegiatan	Pemulihan dan Penyempunan Arsip Akibat Bencana	-	-	0.00%	
Kegiatan:	Aksesibilitas Arsip Statis Hasil Aktivitas Media Kabupaten/Kota	-	-	0.00%	
Sub Kegiatan	Penilaian dan Penetapan Aksesibilitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Pengamanan Keaslian Arsip	-	-	0.00%	
Jumlah		5,250,896,773	4,882,362,807	93.17%	

Padang Panjang, Januari 2024
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

JANUARDI S. BLSI
NIP. 19750122200212 1 005

NOTULEN RAPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Januari 2026
Tempat : Ruang Audio Visual Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

Pada Hari Selasa Tanggal 6 Januari 2026, bertempat di Ruang Audio Visual telah diadakan rapat Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan dihadiri oleh Sekretaris, Kepala Bidang Perpustakaan, Kepala Bidang Kearsipan beserta staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan hasil rapat sebagai berikut :

A. Pengukuran Kinerja TW IV Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

- Sasaran strategis Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan hasil survey yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI dimana hasil dari Survey Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat keluar sekali dalam setahun yaitu pada triwulan IV. Kurangnya realisasi diakibatkan berubahnya indikator penilaian dari tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Target IPLM Tahun 2025 96,80 dengan realisasi 32,47 (33,54%).
- Sasaran strategis Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku dengan indikator Rata-rata Nilai LAKI OPD dengan target 83,08 dan realisasi 84,55 (101,77%).

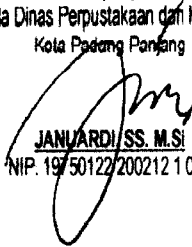
B. Pengukuran Kinerja TW IV Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

- Sasaran strategis Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dengan indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat merupakan hasil survey yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI dimana hasil dari Survey Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat keluar sekali dalam setahun yaitu pada triwulan IV. Kurangnya realisasi diakibatkan berubahnya indikator penilaian dari tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Target NTGM Tahun 2025 74 dengan realisasi 70,88 (95,78%).
- Sasaran strategis Meningkatnya Konservasi, Pembinaan dan Penataan Arsip Secara Baku di OPD dengan indikator Rata-rata Nilai LAKI OPD dengan target 83,08 dan realisasi 84,55 (101,77%).
- Sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah di OPD dengan indikator Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan target 68,5 tetapi hasil penilaian AKIP OPD belum keluar dari Inspektorat.

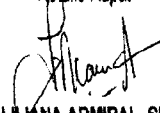
Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 6 Januari 2026

Menyetujui
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang


JANUARDI S.S. M.Si
NIP. 197501222002121005

Notulis Rapat


LILIANA ADMIRAL, SE



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Urip Sumoharjo No. 532 Padang Panjang Kode Pos 27128

Telp. (0752) 485312 Fax. (0752) 485312

Email: dpk@padangpanjang.go.id - website: www.padangpanjangkota.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : Selasa

TANGGAL : 06 Januari 2026

KEGIATAN : Rapat Koordinasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	NAMA	JABATAN	NIP	TANDA TANGAN
1.	Juwandi	keas		
2.	Rita Amelia	Perpustakaan	197104020000000000	
3.	urwenda	staf		
4.	Afridu	staf		
5.	Ririn Asniani	Aspiran	198311272006000000	
6.	Okma Yanti	Bendahara	198210092014072000	
7.	Shaty D. P	staf	19801219 2000 2000	
8.	Wina Widiya	staf		
9.	muhammad	"		
10.	Amelia Anggraini	staf		
11.	Ron. Achbar	"		
12.	BRcina	staf		
13.	Ritmyella	staf	19790516 201406 2004	
14.	PUSPA ANDAYANI	staf	198205 15 2016 04 2001	
15.	Hardian Anwar	staf		
16.	Donnel	staf	19780519 01 01 0000	
17.	FIRSAN ZULINO	Bendahara	19960509 2020 01 0000	
18.				

20.	Anggun Seti			Haf
21.	Rahmaji			Si
22.	Wesha Femeni	Perpustakaan Kearsipan	Perpustakaan	Si
23.	Sri Hidayati			
24.	David De Zabaen			Pring
25.	Yuni Harwidi	Kabid pustaka	1972091920060409	Yuni
26.	Rahimi Farhila	Pustakawan	1982060200512013	Rahim
27.	Liliana A			Liliana
28.	Molyna Novia	1982060200512013	1982060200512013	Molyna
29.	Winder Desrah M	Arsiparis	19880710201012007	Winder
30.	Tahrami			Tahrami
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Molyna Novia, S.Sn
Nip.19781113 200501 2 006

Dokumentasi



LKjIP Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



IKU Perubahan Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET
				FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(3)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perustakaan dan Kearsipan	Nilai	Jumlah Komponen yang Dinilai / Banyak Komponen	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perustakaan dan Kearsipan	%	Jumlah urusan penunjang yang di penuhi		DPA Tahun 2025	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%	Jumlah layanan administrasi keuangan yang dipenuhi		DPA Tahun 2025	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		DPA Tahun 2025	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		DPA Tahun 2025	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		DPA Tahun 2025	
	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	Jumlah orang yang mendapat pakai dinas beserta atributnya		DPA Tahun 2025	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	%	Jumlah layanan administrasi umum yang terpenuhi		DPA Tahun 2025	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi		DPA Tahun 2025	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Jumlah logistik kantor yang terpenuhi		DPA Tahun 2025	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi		DPA Tahun 2025	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dan makan minum yang terlaksana		DPA Tahun 2025	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	Jumlah pengadaan BMD yang diadakan		DPA Tahun 2025	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	Jumlah pengadaan Kendaraan dinas yang diadakan		DPA Tahun 2025	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Jumlah pengadaan kendaraan operasional yang diadakan		DPA Tahun 2025	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan		DPA Tahun 2025	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan		DPA Tahun 2025	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%	Jumlah jasa penunjang yang terpenuhi		DPA Tahun 2025	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	Jumlah surat menyurat yang terpenuhi		DPA Tahun 2025	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	Jumlah layanan jasa yang dihayarkan		DPA Tahun 2025	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi		DPA Tahun 2025	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	%	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		DPA Tahun 2025	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejknya	unit	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		DPA Tahun 2025	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara		DPA Tahun 2025	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara		DPA Tahun 2025	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	unit	Jumlah gedung yang terpelihara		DPA Tahun 2025	

LKJIP Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	Penilaian TKM difokuskan pada tiga tahap aktivitas membaca, pra membaca (15 persen), saat membaca (50 persen), dan pasca membaca (35 persen)	Perpustakaan	Perpusnas RI	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	Jumlah Anggota Perpustakaan yang aktif dan terdaftar di Aplikasi Inis lite		Inis lite	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Orang	Jumlah Masyarakat yang mengunjungi perpustakaan yang telah mengisi daftar kedatangan		Inis lite	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	Jumlah data dan informasi perpustakaan yang didapat		Bidang Perpustakaan	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	Jumlah bahan pustaka yang dikelola		Data Koleksi yang dikelola sesuai SNP	
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	Jumlah Bahan pustaka dan API yang diadakan		DPA Tahun 2025	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Binaan		Data Lembaga Perpustakaan	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan minat baca masyarakat	%	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survey /kajian kegemaran membaca masyarakat		Perpusnas RI	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	Jumlah kegiatan Sosialisasi yang diadakan		DPA Tahun 2025	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	Jumlah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan		DPA Tahun 2025	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan		DPA Tahun 2025	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Locus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	Jumlah kegiatan sosialisasi yang diberikan		DPA Tahun 2025	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan koleksi naskah kuno yang terdaftar	%	Jumlah koleksi naskah kuno yang didapat dari masyarakat		Masyarakat	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi naskah kuno	koleksi	Jumlah koleksi naskah kuno yang didapat dari masyarakat		Masyarakat	

	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	Jumlah masyarakat yang memiliki naskah kuno		Masyarakat	
3	Meningkatnya konservasi, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	Nilai	Hasil penilaian pengawasan kearsipan ke OPD-OPD yang dilakukan LKD	Kearsipan	LKD	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%	OPD yang bernilai baik/ Jumlah OPD		LKD	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diorama yang terfasilitasi	Unit	Jumlah diorama yang terbangun		DPA Tahun 2025	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah laporan yang dibuat		LKD	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diorama yang terfasilitasi	Unit	Jumlah diorama yang terbangun		DPA Tahun 2025	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	Jumlah laporan yang dibuat		LKD	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip Statis yang telah tersedia di JIKN	%	Jumlah arsip yang terinput/ jumlah arsip statis yang ada di LKD		LKD	
	Penyelesaian Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	Jumlah laporan yang dibuat		LKD	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	Jumlah arsip statis yang diselamatkan		LKD	
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	%	Jumlah arsip yang rusak/ jumlah arsip yang diperbaiki		LKD	
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	Jumlah arsip yang di restorasi arsip		LKD	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase autentikasi arsip statis dan arsip alih media kota	%	jumlah arsip yang dialih media/ jumlah arsip yang tersimpan		LKD	
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Jumlah arsip statis yang dialih medikan		LKD	

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INTERNAL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
1	A. Perencanaan Kinerja								
	1. Mendeskripsikan isu strategis OPD pada tujuan dan sasaran dokumen Rencana Strategis	1. Menelaah kembali dokumen Rencana Strategis agar pada saat perubahan Renstra dapat disempurnakan isu strategis OPD pada Tujuan dan Sasaran	1 laporan	B05	Perencana	Selesai	Telah mendeskripsikan isu strategis OPD pada Tujuan dan Sasaran Dokumen Rencana Strategis 2025-2029 dan mempublikasikannya pada padangpanjang.go.id	-	https://padangpanjang.go.id/public/sakip/691d4a998646c_DPK_RENSTRAS%202025-2029%20(1).pdf
	2. Menyelaraskan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran antara dokumen Rencana Strategis dengan Rencana Kinerja	Memastikan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran antara Renstra dan Renja telah selaras	2 Laporan	B05	Perencana	Selesai	Telah dilakukan sinkronisasi antara dokumen Rencana Strategis dengan Rencana Kinerja.		
	3. Menyelaraskan sasaran pada Indikator Kinerja Utama dengan Renstra	Memastikan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah selaras dengan Renstra	1 Laporan	B06	Perencana	Selesai	Telah dilakukan penyesuaian sasaran dan indikator kinerja utama dengan Renstra		

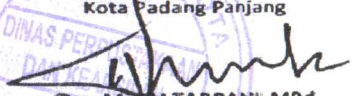
	4	Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan Critical Success Factor (CSF) dan Logical Framework dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	Melakukan perbaikan cascading	1 Laporan	B06	Perencana	Selesai	Telah dilakukan perbaikan Cascading	https://padangpanjang.go.id/publik/sakip/691d49ce76ee6_Cascading%202024-2026.pdf
	5	Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar bidang dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	Membuat crosscutting	1 Laporan	B06	Perencana	Selesai	Telah selesai membuat Crosscutting	https://padangpanjang.go.id/publik/sakip/674d29a896286_CROSSCUTTING-2024%20(1).pdf
	6	Menyelaraskan kegiatan dan sasaran pada Perjanjian Kinerja dengan Cascading	Melakukan sinkronisasi Perjanjian Kinerja dengan Cascading	1 laporan	B06	Perencana	Selesai	Telah dilakukan penyeselarasan Perjanjian Kinerja dengan Cascading	https://padangpanjang.go.id/publik/sakip/67e0c8c3e629f_PK%20Perubahan%20Tahun%202024_E2.pdf
	B. Pengukuran Kinerja								
	1.	Membuat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP Pengumpulan Data Kinerja)	Rapat pembuatan SOP Pengumpulan Data Kinerja)	1 Kegiatan	B 01	Bag Umum dan Kepegawaian	Selesai	Untuk tahun 2024 memang tidak membuat SOP pengumpulan Data Kinerja akan tetapi untuk tahun 2025 dijadikan pelajaran dan telah dibuatkan SOP tersebut	https://padangpanjang.go.id/publik/sakip/698197f1c70c0_SOP%20Pengumpulan%20Data%20Kinerja%20Tahun%202025.pdf

	2	Pimpinan organisasi selaku pengambil keputusan (Decision Maker) ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala	Rapat Pengukuran Kinerja	4 Kegiatan	B03, B06, B09 B12	Kepala Dinas	Selesai	Telah dilakukan Rapat Pengukuran Kinerja yang mana laporannya telah di kirim ke Bagian Organisasi sehingga Kepala Dinas dapat mempedomani Laporan Pengukuran Kinerja tersebut dalam pengambilan keputusan		
	3	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan melakukan pemantauan capaian kinerja unit level dibawahnya secara berjenjang	Melakukan rapat evaluasi secara berkala	4 Kegiatan	B03, B06, B09 B12	Perencana	Selesai	Telah dilakukan Rapat Pengukuran Kinerja yang mana laporannya telah di kirim ke Bagian Organisasi secara berkala		
	4	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Melakukan rapat evaluasi secara berkala	4 Kegiatan	B03, B06, B09 B12	Kepala Dinas	Persiapan	Hasil capaian kinerja dari rapat Pengukuran Kinerja akan dimanfaatkan untuk memberikan imbalan atas hasil capaian kinerja tersebut		
	C. Pelaporan Kinerja									

	1.	Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional pada Dokumen Laporan Kinerja	Rapat evaluasi kinerja secara berkala	4 Laporan	B03,B06, B09, B12	Perencana	Proses	Untuk tahun 2024 belum dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional pada laporan kinerja dan akan dijadikan pedoman untuk laporan kinerja di tahun berikutnya		
	D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal									
	1.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatan implementasi SAKIP	Rapat evaluasi kinerja	1 Laporan	B12	Perencana	Selesai	Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti		

Padang Panjang, Desember 2025

Pt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang


Drs. M. ALI TABRANI, MPd
NIP. 196809221997021001